

 SOP BIRO HUKUM			Nomor SOP : 10/SOP/Ro IV/11/2019
			Tgl. ditetapkan : 22 November 2019
			Tgl Revisi :
			Tgl. diberlakukan :
			ditetapkan oleh :
<p style="text-align: right;">Kepala Biro Hukum</p> <p style="text-align: right;">WAHJU ADJI H. SH, DESS Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19651022 199203 1 001</p>			
SOP PENDOKUMENTASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM			
Dasar Hukum:	Cara Mengatasi :		
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2. Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 3. Keputusan Menteri Perhubungan No.3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan	1. Wajib baca ulang dan verifikasi dokumen peraturan sebelum diupload 2. Rekap data peraturan secara elektronik dan backup softcopy dokumen dalam format word dan pdf		
Keterkaitan:	Peralatan/ Perlengkapan:		
1. SOP Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Transportasi	1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. koneksi internet		
Peringatan:	Pencatatan / Pendataan:		
Teliti dalam melakukan check list kelengkapan dokumen peraturan			

SOP PENDOKUMENTASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM

No	Uraian Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab							Mutu Baku			Ket
		Kepala Biro Hukum	Kabag Peraturan	Kasubbag Peraturan	Kasubbag Dok. PUU dan TU Biro	JFU	Penyusun Peraturan-Perundang-undangan	Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Peraturan dan Instrumen Hukum yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan dalam Berita Negara dan memerintahkan Kepala Bagian Peraturan untuk membuat salinan atas Peraturan dan Instrumen Hukum								Disposisi, PUU/Instrumen Hukum	5 Menit	Dokumen	
2	Menerima disposisi, memeriksa tanda tangan pada Peraturan/Instrumen Hukum, serta memerintahkan Kasubbag untuk membuat Salinan								Disposisi, PUU/Instrumen Hukum	5 Menit	Dokumen	
3	Menerima disposisi, menggabungkan kembali dengan dokumen porses penyusunan Peraturan/Instrumen Hukum, memerintahkan Staf untuk membuat Salinan							Disposisi, PUU/Instrumen Hukum Dokumen Proses Penyusuan Peraturan Perundang-undangan	15 Menit	Dokumen	Dokumen kelengkapan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yaitu usulan prakarsa, draft awal, matrik sanding, pembahasan (undangan, daftar hadir, risalah rapat, draft perubahan)	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab							Mutu Baku			Ket
		Kepala Biro Hukum	Kabag Peraturan	Kasubbag Peraturan	Kasubbag Dok. PUU dan TU Biro	JFU	Penyusun Peraturan-Perundang-undangan	Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
							□					
4	Menerima disposisi, mengecek Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum yang telah ditetapkan dan dokumen proses penyusunannya, serta membuat Salinan dan Nota Dinas permohonan tanda tangan Salinan, softcopy peraturan/instrumen hukum						□		Nota Dinas, Disposisi, PUU/Instrumen Hukum, Dokumen Proses Penyusuan Peraturan Perundang-undangan, Lembar Salinan, Nota Dinas, softcopy peraturan/instrumen hukum	30 menit	Dokumen	Lembar Salinan dibuat rangkap 3
5	Menerima, memeriksa, dan memberi paraf konsep Nota Dinas, memeriksa lembar Salinan yang akan di tanda tangan, memeriksa dokumen kelengkapan proses PUU/Instrumen Hukum, serta mengecek softcopy peraturan/instrumen hukum			□					Nota Dinas, Disposisi, PUU/Instrumen Hukum, Dokumen Proses Penyusuan Peraturan Perundang-undangan, Lembar Salinan, Nota Dinas, softcopy peraturan/instrumen hukum	15 menit	Dokumen	

No	Uraian Jenis Kegiatan	Penanggung Jawab							Mutu Baku			Ket
		Kepala Biro Hukum	Kabag Peraturan	Kasubbag Peraturan	Kasubbag Dok. PUU dan TU Biro	JFU	Penyusun Peraturan-Perundang-undangan	Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
												
10	Memeriksa dan menyetujui hasil scan untuk diunggah dalam JDIH dan memerintahkan penyimpanan dokumen fisik dalam ruang dokumentasi								Disposisi, Nota Dinas PUU/Instrumen Hukum, Dokumen Proses Penyusuan Peraturan Perundang-undangan, Lembar Salinan, Nota Dinas, softcopy peraturan/instrumen hukum	10 menit	Dokumen	
11	a. Mengunggah Peraturan Perundang-undangan ke JDIH dan meminta persetujuan admin untuk diunggah dan penyimpanan softcopy (password) b. Melakukan pemilahan dokumen sesuai nomor, jenis, kode, keamanan, dan klasifikasi arsip serta meminta persetujuan pengarsipan internal								Disposisi, Nota Dinas PUU/Instrumen Hukum, Dokumen Proses Penyusuan Peraturan Perundang-undangan, Lembar Salinan, Nota Dinas, softcopy peraturan/instrumen hukum	10 menit	Dokumen	
12	Memberikan persetujuan (approved) password pengunggahan dan memberikan persetujuan pendokumentasian dokumen softcopy dan fisik peraturan/instrumen hukum dan dokumen kelengkapan								Disposisi, Nota Dinas PUU/Instrumen Hukum, Dokumen Proses Penyusuan Peraturan Perundang-undangan, Lembar Salinan, Nota Dinas, softcopy peraturan/instrumen hukum	5 menit	Persetujuan /Tampilan Peraturan dalam JDIH/Folder Dokumen	